

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie Habib, 2005, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, RENVOI, Nomor 28 Th. III.

_____, 2008, *Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Surabaya.

_____, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, cetakan keempat, PT Refika Aditama, Bandung.

Adjie, Habib dan Sesung Rusdianto, 2020, *Tafsir, Penjelasan Dan Komentar Atas UUJN*, Refika Aditama, Bandung.

Adjie, Habib dan Syaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Amirruddin dan Asikin Zaenal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Andasasmita Komar, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 2006, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Atmasasmita Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung.

_____, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Bakhri Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta.

_____, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bodenheimer Edgar, 1970, *Treatise on Justice*, Philosophical Library, New York.

Efendi Lutfi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.

- Effendi Tolib, 2016, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.
- Erliyani Rahmida, Ratomi Achmad, 2018, *Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Kewenangan di Dalam Proses Peradilan Pidana*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Ghofur Anshori Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- H, Freddy dan Helena Leny, 2017, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaya, Jakarta.
- Habib Mardianto, 2012, *Mahkamah Konstitusi, Sebagai Peradilan Perundang-Undangan*, Media Ilmu, Bandung.
- Hadi Sutopo Ariesto, 2002, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, PT. Tarsito, Bandung.
- Hadikusuma Hilman, 2003, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., Martosoeignjo, R. Sri Soemantri, Manan Sjachran, Marzuki H.M., Laica, Stoink F.A.M, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanitijo Ronny Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Junimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Kohar A., 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung, Alumni.
- _____, 1992, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.

- Kosoemawati Ira dan Rijan Yunirman, 2009, *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Raih Asa Sukses Media Notariat, Jakarta.
- Lotulung, Paulus Effendi, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mangesti, Yovita A. & Tanya, Bernard L., 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Marpaung Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martha, Aroma Elmina, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Martokusumo Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Edisi Ke-6, Yogyakarta.
- MD Mahfud, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Muhammad Affandi, 2009, *Kewajiban Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Nasution S., 2003, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cetakan Keenam, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta.

Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Priyanto Anang, 2012, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ombak, Yogyakarta.

Reksodiputro Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Riyadi Eko, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.

Soekanto Soejono dan Mamudji Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

Soekanto Soejono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soesanto R., 1982, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita*, Jakarta.

Subekti R., 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Cetakan ke-XXVIII Jakarta.

_____, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

Sulandari Hartati & Rifiani Nisyia, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas*, Jakarta.

Supriyadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tedjosaputro Liliana, 1995, *Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Biagraf Publishing, Cetakan I, Yogyakarta.

Tobing, G.H.S Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Untung Budi, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Van Apeldoorn L.J, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Staatsblad* 1915 Nomor 732

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 180.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020

D. Jurnal, Tesis, Makalah

Alfiansyah Anang, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Pancasila, Jakarta, 2019.

Arief, Andi Nurfitri Riandini, Akub Syukri & Muchtar Syamsuddin, Januari 2019, “Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan”, *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, No.1 Vol.4, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

- Dahlan, April 2016, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana di Bidang Kenotariatan”, *Kanun Jurnal Hukum*, No.1 Vol 18.
- Darusman, Yoyon Mulyana, 2017, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 7 No. 1.
- Dewi, Ni Luh Putu Sri Purnama, Atmadja, I Dewa Gde, Yusa I Gede, 2018, “Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 145 156 No. 1, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana.
- Edwar, Faisal, A. Rani, Ali Dahlan, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep *Equality Before The Law*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2, Magister Hukum Udayana, 2018.
- Heriyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik”, *Jurnal*, No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Prima Medan, 2016.
- Mardiansyah Alfian, Adisti, Nesia Angrum, RS, Iza Rumesten, Nurliyantika Rizka, Ramadhan, Muhammad Syahri, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020.
- Muda Iskandar, “Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusi Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal*, Vol. 13 No. 3, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, 2020, hlm. 268-271.
- Satria Hariman, Juni 2018, “Restorative Justice : Paradigma Baru Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.25, No.1.
- Setiawan, M. Arief, 1997, “KUHP Dalam Prespektif HAM”, *Jurnal Hukum*, No.9 Vol 4-1997, UII Press, Yogyakarta.
- Walukow, Julita Mellissa, 2013, Prinsip *Equality Before the Law* bagi Narapidana di dalam Lembaga Perasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.
- Wantu, Fence M, “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata”, *Jurnal Mimbar*, Vol. 25 No. 2, Universitas Gadjah Mada, Juni 2018.
- Widiada, Made Pramanaditya, 2018, Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, *Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Yulia Rena, 2016, “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No.1.

Yo, Reynaldo James, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 No. 2, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2013.

Amilia Rosyana Siregar, “Peran Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Kenotariatan”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2017.

Andri Cipta Jaya Antonius, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Terhadap Akta Yang Dibuatnya Di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2018.

Dinda Permata Hertina, Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Majelis Pengawas Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2017.

Herman Faisal Siregar, “Konsistensi Pengaturan Kedudukan Notaris Dalam Menghadapi Kasus di Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Pemanggilan Notaris (Analisis Terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/X/2012)”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Juleni, “Implementasi Pemeriksaan Notaris oleh MKN Atas Dugaan Malekukan Tindak Pidana Berdasarka Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenoariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, 2018.

Laxmi Kandita Puspita, “Kajian Asas *Equality Before The Law* Pada Jabatan Notaris Dalam Rumusan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.

Stevanus Weven Jonathan Hendry, “Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penyidik terkait Pemanggilan Notaris untuk

Kepentingan Penyidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2020.

Yoga Adhyaksa Ogie Chaniago, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polisi”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2020.

Zidniy Irvan, “Penerapan Asas *Equality Before The Law* Terhadap Pemeriksaan Anggota Dewan Terduga Tindak Pidana (Analisa Put. MK. No. 76/PUU XII/2014)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

Dyah Madya Ruth S.N., “Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di NTB)”, *Indonesia Notary Community (INC)*, Bogor, 2015.

N.G Yudara, “Notaris dan Permasalahannya pokok-pokok pemikiran di seputar kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, *Makalah Kongres INI*, Jakarta, Januari 2005.

Supriyanto, “Beberapa Permasalahan Umum Notaris Sumatera Utara Terkait Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Seminar Nasional Notaris*, Pengwil INI Sumatera Utara, Hotel Grand Kanaya, 2017.

Sutrisno, “Tanggapan Terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris*, MKn USU, 2007.

Wawan Setiawan, “Kedudukan dan Keberadaan Pejabatn Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional, *Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, 2001.